

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era pemerintahan berbasis digital, efektivitas layanan publik tidak lagi hanya bertumpu pada ketersediaan sarana secara fisik, melainkan sangat bergantung pada tingkat literasi atau kecakapan digital yang dimiliki oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Transformasi digital yang terjadi secara global telah mendorong sektor publik, termasuk pemerintahan di Indonesia, untuk beradaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi secara komprehensif (Hilir et al., 2021).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah institusi pemerintah strategis yang bertugas sebagai penyelenggara pelatihan, sertifikasi dan penyusun kebijakan di bidang SDM Aparatur. BPSDM Provinsi Jawa Barat juga memegang peranan vital dalam mencetak *Smart ASN* untuk menghadapi era disrupsi dan transformasi digital seiring dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Strategi pengembangan ini dirancang agar aparatur tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu dalam mengelola informasi secara cerdas. Dalam hal ini, BPSDM Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pengembangan kompetensi telah melakukan inovasi dengan mengembangkan sebuah aplikasi bernama *Jabar CorpU Talent*. Aplikasi ini berfungsi sebagai wadah digital yang dirancang khusus untuk mendukung pemetaan dan pengembangan potensi ASN secara berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, Bidang Sekretariat BPSDM Provinsi Jawa Barat bahwa saat ini dapat dikatakan sedang berada pada titik kritis dalam transisi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital yang sepenuhnya mandiri. Dalam hal ini, terdapat kesenjangan yang sangat signifikan antara standar ideal birokrasi digital yang diharapkan dengan fakta kompetensi yang ada di lapangan. Standar ideal tata kelola tersebut secara yuridis telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa, " Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip, efektivitas, keterpaduan, kesinambungan,

efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan, keamanan." Seharusnya, implementasi digitalisasi seharusnya menciptakan efisiensi, efektivitas dan kemandirian kerja bagi setiap individu pegawai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kriteria ideal tersebut belum terpenuhi secara optimal karena masih terdapat kendala pada kapasitas *brainware* (pengguna) dalam mengadopsi pembaruan sistem elektronik secara mandiri.

Jika pemahaman literasi digital yang dimiliki pegawai bersifat rendah atau negatif, dampaknya bisa jauh lebih merusak ritme kerja organisasi dibandingkan kegagalan sistem itu sendiri. Rendahnya pemahaman analitis digital seringkali menimbulkan kelalaian atau *human error*, kebocoran data rahasia (*e-safety*), hingga budaya pendelegasian tugas yang masif. Efek dari literasi digital yang rendah seringkali menyebar cepat; satu pegawai yang tidak mandiri dalam mengoperasikan sistem akan membebani penyelesaian tugas rekan kerja lainnya, yang berujung pada menurunnya kinerja unit kerja secara keseluruhan.

Pengamatan awal dan data internal menunjukkan bahwa meskipun fasilitas dan aplikasi seperti *Jabar CorpU Talent* telah tersedia, hal tersebut belum sepenuhnya menjamin stabilitas capaian kinerja instansi secara konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya kendala pada kapasitas *brainware* (pengguna) yang tidak berjalan secara optimal.

Tahun	Target	Realiasi	Perkembangan	Status Capaian
2021	34,00	34,15	+ 0,15	Tercapai
2022	36,00	36,80	+ 2,65	Tercapai
2023	37,00	37,55	+ 0,75	Tercapai
2024	38,00	32,13	-5,42	Tidak Tercapai

Gambar 1. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2024, Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Provinsi Jawa Barat diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Provinsi Jawa Barat, data internal ini menunjukkan perubahan capaian sasaran strategis yang menurun. Meskipun sistem digital telah difasilitasi, peralihan dari ketersediaan teknologi menjadi peningkatan kinerja profesional masih perlu diuji secara ilmiah penyebab penurunannya. Statistik capaian kinerja pada Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi memperlihatkan adanya kemerosotan realisasi kinerja sebesar 5,42 poin (dari 37,55 pada tahun 2023 menjadi 32,13 pada tahun 2024). Dokumen LKIP juga menyoroti bahwa pengembangan kompetensi yang beririsan langsung dengan adaptasi teknologi masih belum menjadi program prioritas utama instansi.

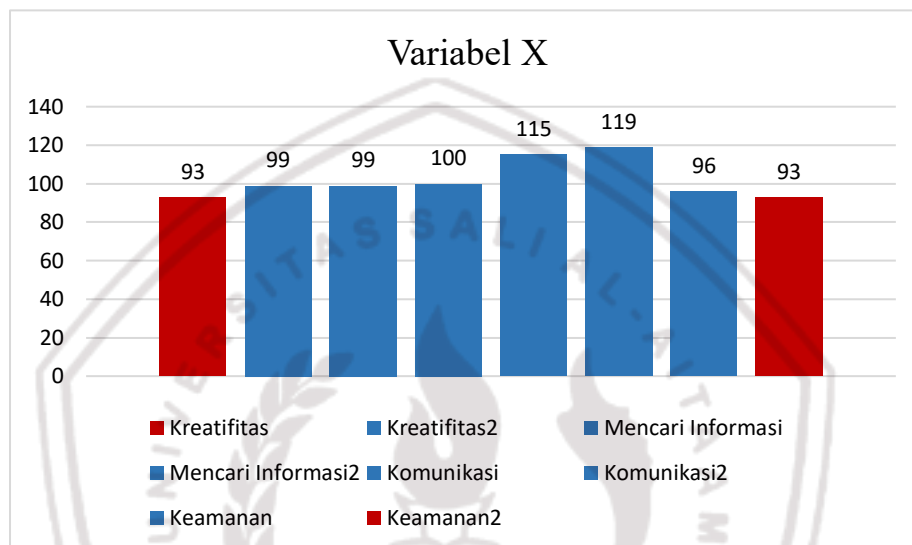
Kemudian guna mengidentifikasi fenomena secara mendalam, peneliti juga melakukan studi pendahuluan (pra-survei) kepada 30 responden dari total populasi yang berjumlah 63 aparatur di lingkungan Bidang Sekretariat BPSDM Provinsi Jawa Barat. Pengukuran pra-survei ini mengacu pada kriteria interval kelas yang membagi skor ke dalam lima rentang klasifikasi, mulai dari "Buruk Sekali" hingga "Sangat Baik". Hasil rekapitulasi awal atas respons aparatur terhadap penerapan kompetensi Literasi Digital disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Total Penskoran Variabel Literasi Digital

No	Dimensi	Item	Pembobotan	Persentase (%)	Kategori
1.	Skill Fungsional	X. 1	115	11,10	Baik
2.	Skill Fungsional	X. 1	107	10,32	Baik
3.	Kreativitas	X. 2	93	8,97	Cukup
4.	Kreativitas	X. 2	99	9,49	Cukup
5.	Mencari Informasi	X. 3	99	9,55	Cukup
6.	Mencari Informasi	X. 3	100	9,65	Cukup
7.	Komunikasi	X. 4	115	11,10	Baik
8.	Komunikasi	X. 4	119	11,48	Baik
9.	Keamanan	X. 5	96	9,26	Cukup
10.	Keamanan	X. 5	93	9,97	Cukup
Total			1.036	100 %	Baik
Rata-rata			103,6		

Sumber: data primer diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, secara akumulatif rata-rata skor variabel Literasi Digital berada pada angka 103,6 yang masuk dalam klasifikasi "Baik". Namun, angka rata-rata tersebut belum menceritakan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan karena masih menutupi ketimpangan kompetensi pada beberapa dimensi krusial. Ketimpangan antar-dimensi ini dapat dilihat lebih tajam pada visualisasi grafik berikut:



Gambar 1. 2 Grafik Variabel Literasi Digital

Sumber: data primer diolah peneliti (2026)

Merujuk pada Gambar 1.2 dan rincian Tabel 1.1, grafik memperlihatkan fluktuasi tiang yang sangat kontras. Pegawai memang menunjukkan dominasi capaian pada dimensi Komunikasi dan *Skill Fungsional* yang masing-masing meraih bobot persentase tertinggi sebesar 11,48% dan 11,10%. Akan tetapi, grafik menukik tajam pada dimensi yang bersifat analitis. Titik paling rawan terlihat pada balok merah yang menunjukkan skor terendah di angka 93, di mana dimensi Kreativitas hanya menyumbang proporsi minim sebesar 8,97%, disusul oleh dimensi Keamanan Digital dengan persentase 9,26%. Visualisasi beserta rincian persentase ini menjadi bukti konkret bahwa aparatur secara teknis mampu mengetik dan mengirimkan dokumen, namun sangat lemah dalam daya inisiatif saat sistem bermasalah, serta sangat rentan atau lalai terhadap potensi kebocoran naskah dinas rahasia (*e-safety*).

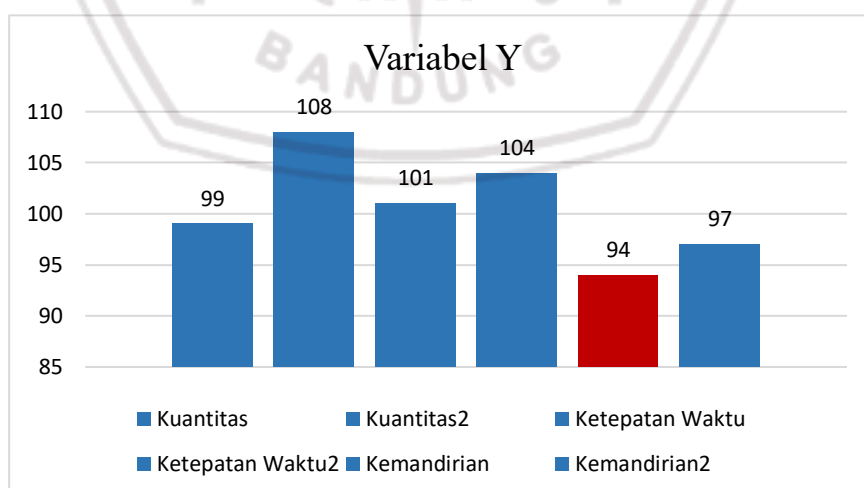
Kesenjangan dan ketimpangan pada aspek literasi digital tersebut, secara rasional, akan berdampak langsung pada kelancaran operasional tata usaha instansi. Guna memvalidasi dugaan penurunan ritme kerja tersebut, peneliti turut melakukan tabulasi pra-survei terkait pencapaian Kinerja Pegawai, dengan rincian hasil sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Total Penskoran Variabel Kinerja

No	Dimensi	Item	Pembobotan	Persentase (%)	Kategori
1.	Kualitas	Y. 1	107	13,17	Baik
2.	Kualitas	Y. 1	102	12,56	Baik
3.	Kuantitas	Y. 2	99	12,19	Cukup
4.	Kuantitas	Y. 2	108	13,30	Baik
5.	Ketepatan Waktu	Y. 3	101	12,43	Cukup
6.	Ketepatan Waktu	Y. 3	104	12,80	Baik
7.	Kemandirian	Y. 4	94	11,57	Cukup
8.	Kemandirian	Y. 4	97	11,95	Cukup
Total			812	100 %	Cukup
Rata-rata			101,5		

Sumber: data primer diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 1.2 konfirmasi terhadap menurunnya ritme tata naskah terbukti sah, di mana rata-rata total variabel Kinerja Pegawai hanya membukukan skor 101,5 dan terperangkap secara mutlak di kategori "Cukup". Untuk melihat pada area mana kinerja pegawai ini paling terhambat, dapat diamati melalui grafik fluktuasi kinerja di bawah ini:



Gambar 1. 3 Grafik Variabel Kinerja

Sumber: data primer diolah peneliti (2026)

Berdasarkan visualisasi Gambar 1.3 beserta rincian Tabel 1.2, terlihat jelas ketidakstabilan ritme kerja aparatur. Meskipun dimensi Kuantitas dan Kualitas masih mampu menyentuh standar "Baik" dengan mencatatkan persentase capaian tertinggi masing-masing sebesar 13,30% dan 13,17%, capaian tersebut harus dibayar mahal dengan terhambatnya ritme dimensi Ketepatan Waktu yang grafiknya berfluktuasi naik-turun secara tidak konsisten. Puncak permasalahan kinerja teridentifikasi dengan sangat jelas pada balok berwarna merah di angka 94, di mana dimensi Kemandirian mencatatkan persentase terendah yakni hanya menyentuh proporsi 11,57%. Kondisi visual dan rasio persentase ini menegaskan realitas di lapangan: ketidakmampuan aparatur menguasai aspek analitis digital telah menciptakan budaya ketergantungan tugas, di mana pegawai terus-menerus melimpahkan penyelesaian dokumen elektronik kepada rekan kerja lain, yang pada akhirnya merusak efisiensi waktu penyelesaian tugas di lingkungan kesekretariatan.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (2022), “literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan seseorang menggunakan gawai atau perangkat komputer, melainkan melibatkan kecakapan kognitif dan etika di ruang digital”. Secara terperinci, *funksional skill* mengukur penguasaan dan keterampilan seseorang saat mengaplikasikan perangkat keras, program komputer, maupun platform digital lainnya untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Kreativitas dan komunikasi efektif mengukur kemampuan individu dalam mengembangkan tata kelola etika dan tata krama saat berkomunikasi di dunia digital. Keamanan digital menilai kesadaran dan kemampuan pengguna dalam melindungi data pribadi serta menjaga keamanan perangkat dari ancaman siber (Septanto et al., 2025).

Keberhasilan dari semua program dan kebijakan berbasis digital tersebut dapat dievaluasi dari beberapa aspek kinerja aparatur di lapangan. Menurut Robbins (2016), “meningkat atau menurunnya kinerja seorang pegawai dievaluasi melalui beberapa dimensi, yang mencakup sejauh mana kemandirian dan efektivitas pegawai, ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas, beserta dimensi mutu (kualitas) dan volume (kuantitas) hasil kerjanya” (Demanto et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al., (2024) menyatakan bahwa kompetensi literasi digital dan komunikasi yang intensif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. Penelitian lain juga dilakukan oleh Firmansyah & Ardianto (2023) menyatakan bahwa pemahaman *E-Safety* dan *Digital Culture* (yang merupakan bagian dari literasi digital) berpengaruh kuat terhadap kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah. Pemahaman teknologi merupakan aspek yang dapat merubah kecepatan penyelesaian tugas, instansi harus mempertahankannya untuk lebih memengaruhi kinerja.

Dari berbagai hasil penelitian di atas, secara teoretis Literasi Digital seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan Kinerja Pegawai secara signifikan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan sistem SPBE dan tingginya skor *skill* fungsional di lingkungan BPSDM Provinsi Jawa Barat tidak selalu berakhir pada tingginya kualitas kinerja secara keseluruhan.

Kesenjangan (*research gap*) yang ditemukan adalah kurangnya studi yang mengintegrasikan antara variabel Literasi Digital dengan institusi birokrasi yang memiliki fungsi spesifik sebagai penyelenggara dan penilai kompetensi SDM (*Corporate University*). Kebanyakan penelitian terdahulu memperlakukan objek aparatur sebagai pengguna teknologi publik secara umum, bukan sebagai *role model* yang bertugas mengembangkan kompetensi pegawai lainnya. dari kesenjangan tersebut, letak kebaruan (*novelty*) pada penelitian ini adalah fokus objek kajian yang secara eksklusif menyoroti unit sentral administrasi bidang Sekretariat di dalam jantung institusi pembina SDM itu sendiri. yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan BPSDM Provinsi Jawa Barat dalam mencapai target strategis kelembagaan menuju *Corporate University* Kategori A pada tahun 2026, sebuah sudut pandang kausalitas yang belum dieksplorasi secara mendalam oleh penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hal yang mendorong penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani antara ekspektasi implementasi birokrasi digital (SPBE) dengan dinamika realitas kapasitas teknis SDM yang ada. Dengan memahami pengaruh Literasi Digital pada Bidang Sekretariat BPSDM

Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi instansi dalam merancang kebijakan pengembangan *Smart ASN* guna menjamin keberlangsungan pelayanan di tengah target pencapaian *Corporate University* 2026. Kemudian peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul "**Pengaruh Literasi Digital terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Sekretariat BPSDM Provinsi Jawa Barat**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kreativitas dan keamanan digital, pemahaman analitis digital pegawai masih lemah, dibuktikan dari rendahnya capaian dimensi kreativitas (8,97%) dan keamanan digital (9,26%) yang memicu risiko kebocoran data kerahasiaan.
- 2) Minimnya kemandirian pegawai, dimensi kemandirian mencatatkan persentase kinerja terendah (11,57%), yang memicu budaya pelimpahan tugas kepada rekan kerja lain.
- 3) Terhambatnya ketepatan waktu tugas, ketidakmampuan teknis digital merusak ritme dan efisiensi waktu penyelesaian tugas, meskipun capaian kuantitas (13,30%) dan kualitas (13,17%) sudah tergolong baik.
- 4) Menurunnya Indeks Profesionalitas ASN, terdapat penurunan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi sebesar 5,42 poin, yakni dari 37,55 pada tahun 2023 menjadi 32,13 pada tahun 2024.
- 5) Adaptasi Teknologi Belum Menjadi Prioritas: Pengembangan kompetensi digital belum menjadi program prioritas utama, sehingga berisiko menjadikan sistem digital (SPBE) instansi tidak beroperasi secara maksimal.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat adanya batasan peneliti, baik dari segi alokasi waktu tenggat studi, kapasitas tenaga, keterbatasan anggaran, maupun kedalaman teori, maka fokus penelitian ini mutlak dibatasi. Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih terarah dalam pembuktian empiris tetap sistematis, batasan masalah dirumuskan sebagai berikut;

- 1) Penelitian ini hanya difokuskan pada pegawai yang bertugas di unit Bidang Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat
- 2) Variabel penelitian difokuskan pada pengukuran kemampuan Literasi Digital untuk variabel independen X. Dan evaluasi Kinerja Pegawai sebagai variabel dependen Y.
- 3) Ruang lingkup pengambilan data primer, penyebaran angket, dan observasi lapangan dibatasi hanya pada fenomena kondisi operasional pegawai yang direkam selama priode penyusunan penelitian ini, yakni pada rentan waktu semester genap tahun 2026.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran Literasi Digital pegawai pada Bidang Sekretariat BPSDM Provinsi Jawa Barat?
- 2) Bagaimana capaian Kinerja Pegawai pada Bidang Sekretariat BPSDM Provinsi Jawa Barat?
- 3) Seberapa besar Pengaruh Literasi Digital terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Sekretariat BPSDM Provinsi Jawa Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini maka, tujuan penelitian di uraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui gambaran Literasi Digital pegawai pada Bidang Sekretariat BPSDM Provinsi Jawa Barat.
- 2) Untuk mengetahui capaian Kinerja Pegawai pada Bidang Sekretariat BPSDM Provinsi Jawa Barat.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besarnya Pengaruh Literasi Digital terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Sekretariat BPSDM Provinsi Jawa Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan dan pengayaan khazanah keilmuan di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya yang berkaitan pengaruh literasi digital terhadap performa kinerja di sektor publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Instansi khususnya BPSDM Provinsi Jawa Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan kompetensi digital guna memulihkan nilai Indeks Profesionalitas ASN dan mencapai kualifikasi *Corporate University* Kategori A tahun 2026.
- 2) Bagi Pegawai, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pemahaman sebagai sarana evaluasi diri untuk meningkatkan literasi digital dan kemandirian kerja guna mendukung profesionalisme ASN.
- 3) Bagi pihak kampus, penelitian ini diharapkan menjadi penambah perbendaharaan kepustakaan kampus.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji dan melakukan penelitian dengan variabel literasi digital dalam organisasi pemerintahan.